

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 3, April 2025, P. 155-169
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230510>

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat

¹Tiara Azhariah, ²Andis Febrian

¹²Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Email
tiara150102@gmail.com, andisfebrian8927@yahoo.com

Abstrak

Bagaimana pengaruh alokasi dana di bidang pendidikan serta kesehatan terhadap IPM di provinsi Sumatera Barat dalam pandangan islam, merupakan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Terdapat perbedaan antara teori pengaruh pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dengan data yang telah diperoleh, di mana terjadi ketidaksesuaian antara peningkatan pengeluaran dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat dalam pandangan islam. Studi kepustakaan dijadikan sebagai salah satu metode dalam pengumpulan data maupun informasi. Dana penelitian kuantitatif juga dipilih sebagai jenis dari penelitian ini. Bps dan direktorat jendral keuangan provinsi sumatera barat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F dan uji determinasi (R square). Dari studi ini mengindikasikan jika pengeluaran pemerintah sektor pendidikan serta kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara parsial. Sedangkan secara sama-sama pengeluaran pemerintah sektor pendidikan serta kesehatan juga memiliki dampak terhadap indeks pembangunan manusia provinsi Sumatra Barat. Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia sebesar 56,8%. Lebihnya sejumlah 43,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti. Misalnya seperti pendapatan perkapita.

Kata Kunci: *Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Indeks pembangunan Manusia*

Abstract

How the allocation of funds in the education and health sectors influences the HDI in West Sumatra province from an Islamic perspective is an issue that will be discussed in this research. There is a difference between the theory of the influence of education and health sector spending on the human development index and the data that has been obtained, where there is a mismatch between increasing spending and increasing the human development index. This research aims to identify the influence of government spending in the education and health sectors, both partially and simultaneously, on the human development index in West Sumatra province from an Islamic perspective. Literature study is used as a method for collecting data and information. Quantitative research funding was also chosen as the type of this research. BPS and the Directorate General of Finance of West Sumatra Province were used as sources for obtaining secondary data needed in this research. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. Hypothesis testing uses the t test, F test and determination test (R square). This study indicates that government spending in the education and health sectors partially influences the Human Development Index. Meanwhile, government spending in the education and health sectors also has an impact on the human development index for West Sumatra province. The influence of government expenditure variables in the education and health sectors has an influential contribution to the human development index variable of 56.8%. An additional 43.2% is influenced by other variables that were not examined. For example, per capita income.

Keywords: *Government Expenditure in the Education Sector, Government Expenditure in the Health Sector, Human Development Index*

Article Info

Received date: 27 March 2025

Revised date: 30 March 2025

Accepted date: 15 April 2025

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu langkah yang terus bertransformasi mengarah pada

kebaikan dan bermaksud untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, perhatian pembangunan lebih ditujukan pada pengembangan kualitas manusia. Hal ini ialah hasil dari pembangunan sebelumnya yang lebih berfokus pada pertumbuhan, tetapi ternyata menyebabkan kesenjangan yang signifikan, seperti ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, rendahnya kualitas hidup, ketidakmerataan tingkat pendidikan, penurunan daya beli masyarakat, dan lain sebagainya.¹

Pemerintah memiliki peran yang krusial untuk mempercepat pembangunan manusia lewat dana yang dialokasikan bagi seluruh warga negara yang berfungsi dalam meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, serta bidang lainnya. Untuk membangun Sumber Daya Manusia, diperlukan peningkatan kemampuan dasar individu agar mereka mempunyai kesempatan yang luas untuk ikut serta dalam progres pembangunan. Walaupun penerimaan domestik bruto yang tinggi, itu belum mampu memperlihatkan kemajuan diberbagai bidang, jika tidak diikuti dengan peningkatan kapabilitas dan kompetensi warga negaranya. Diantara solusi untuk mengevaluasi prestasi pengembangan manusia di suatu negara adalah dengan menggunakan (IPM), yang mengukur jumlah pendidikan, kesehatan, serta kemampuan beli ekonomi rakyat.²

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) pertama kali pada tahun 1990. Laporan Pembangunan Manusia (HDR) tahunan akan diterbitkan secara berkala. Menurut UNDP, perkembangan manusia yaitu proses memperbesar cakupan opsi yang tersedia bagi masyarakat. Definisi ini mencakup banyak aspek pembangunan. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan harus dianalisis dan dipahami dari sudut pandang kemanusiaan, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi.³

Sumatera Barat ialah daerah dengan potensi sumber daya manusia yang cukup padat, dengan kondisi indeks pembangunan manusia yang cenderung meningkat pada beberapa tahun terakhir ini, walaupun peningkatannya hanya berjalan lambat. Di wilayah Sumatera Barat, tidak semuanya memiliki kualitas manusia yang tinggi dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Beberapa kabupaten/kota yang masih memiliki kualitas manusia yang rendah yaitu kabupaten dhamasraya dengan IPMnya 69,13, Kabupaten Solok Selatan dengan IPMnya 68,98 dan Kabupaten Mentawai dengan IPMnya 68,75. Di bawah ini merupakan data Indeks pembangunan manusia dari tahun ke tahun di provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Perubahan
2004	70,5	0
2005	71,19	0,69
2006	71,65	0,46
2007	72,23	0,58
2008	72,96	0,73
2009	73,44	0,48

¹ M L. Jingan, *ekonomi pembangunan dan perencanaan* (Jakarta: PT RajaWali Pers Persada, 2014)

² Heppi Siofya, *pengaruh tingkat kemiskinan, Pertumbuhan Ekonmi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol 15, No 2, 2018

³ Syarifah Siafira, "Pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di kota langsa," Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JENSI), 3 (2019), 126–38.

2010	67,25	-6,19
2011	67,81	0,56
2012	68,36	0,55
2013	68,91	0,55
2014	69,36	0,45
2015	69,98	0,62
2016	70,73	0,75
2017	71,24	0,51
2018	71,73	0,49
2019	72,39	0,66
2020	72,38	-0,01
2021	72,65	0,27
2022	73,26	0,61
2023	73,75	0,49

Sumber: BPS Sumatera Barat

Baerdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 2004 sampai 2009 rata-rata nilai indeks pembangunan manusia cenderung mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit. Pada tahun 2010, indeks pembangunan manusia mengalami penurunanyang signifikan yaitu sebesar 6,19 hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Pada tahun 2011 sampai 2019 indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat kembali meningka walaupun di tahun 2012 dan 2013 jumlah peningkatannya samm. Tahun 2020 indeks pembangunan manusia turun sebanyak 0,01. 2021 sampai 2023, indeks pembangunan manusia di sumatera barat terus menngkat.

Untuk menghasilkan manusia yang memiliki kualitas, diperlukan fasilitas pendukung. Karena itu, diperlukan modal guna membentuk manusia yang memiliki kualitas yang baik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan ialah aspek yang sangat penting pada pembangunan di suatu daerah. Demi kelancaran tersebut tentu diperlukan alokasi dana. Oleh karena itu, perhatian pemerintah sangat penting dalam melaksanakan beberapa aspek pendidikan melalui belanja negara. Belanja publik dipakai untuk memodali sektor publik yang krusial, khususnya sektor pendidikan.

Pada Provinsi Sumatera Barat, pemerintah sangat memperhatikan mutu pendidikan, fakta ini bisa diperhatikan dari pengeluaran yang dilakukan disektor penddikan. Berdasarkan data, pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi. 2010 samai 2004, pengeluaran pemerintah terus meningkat. Namun tahun 2011 pengeluaran pemerintah turun sebesar 39,88 %. Tahun 2012 dan 2013 pengeluaran pemerintah kembali meningkat, bahkan tahun 2013 peningkatannya mencapai 99,49 %. Tahun 2014 pengeluaran pemerintah turun sebesar 75,81 % dari tahun 2013. Pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah naik secara signifikan mencapai 693,01 %. Dan tahun 2016 kembali turun sebesar 84,80 %. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 pengeluaran pemerintah kembali naik secara signifikan sebesar 313,79 % dan 386, 56%. 2019 pengeluaran pemerintah turun sebesar 19,66% dan kembali naik pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 turun kembali sebesar 26,67 % dan terakhir mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 6,04 %.

Selain pendidikan, sektor kesehatan adalah bidang yang begitu krusial pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Dans yang dikeluarkan pemerintah pada bidang kesehatan yaitu merujuk pada total belanja atau biaya yang disebarkan oleh pemerintah guna mendukung mutu kesehatan pada suatu negara. Pengeluaran ini meliputi berbagai aspek kesehatan, termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian fasilitas

kesehatan, penyediaan layanan kesehatan, upah tenaga medis, pembelian obat-obatan dan peralatan medis, program-program pencegahan penyakit, dan penelitian kesehatan

Tabel 3. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004-2023.

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Rp)	Perubahan (%)
2004	82.395.000.000	0
2005	90.891.000.000	10,32
2006	95.763.876.187	5,36
2007	24.433.150.722	-74,49
2008	184.321.215.838	654,39
2009	193.906.171.068	5,20
2010	192.838.848.654	-0,55
2011	230.491.345.186	19,53
2012	306.393.221.558	32,39
2013	236.261.181.180	-22,89
2014	437.727.158.950	85,27
2015	456.171.335.600	4,21
2016	638.240.418.996	39,91
2017	1.922.225.470.120	201,18
2018	714.427.957.456	-62,83
2019	1.421.535.586.556	98,98
2020	653.547.259.294	-54,03
2021	623.379.888.953	-4,62
2022	759.531.196.284	21,84
2023	950.772.130.345	25,18

Sumber: DPJK Kemenkeu RI

Berdasarkan tabel 1.3, dapat lihat bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan mengalami fluktuasi. 2004-2006 pengeluaran pemerintah terus meningkat. Saat 2007 pengeluaran pemerintah menurun sebesar 74,49 % dari pengeluaran tahun lalu. Tahun 2008 dan 2009 pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, 2008 kenaikannya signifikan yaitu sebesar 654,39 % dan 2009 kenaikannya hanya 5,20 %. 2010 pengeluaran pemerintah kembali mengalami penurunan sebesar 0,55 %. Tahun 2011 dan 2012 pengeluaran pemerintah kembali naik dan 2013 turun sebesar 22,89 %. Selanjutnya pada tahun 2014 sampai 2017 pengeluaran terus naik walaupun tidak terlalu signifikan. 2018 pengeluaran pemerintah turun sebesar 62,83 % dari pengeluaran tahun lalu. 2019 pengeluaran pemerintah naik sebesar 98,98 % dan kembali turun pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, pengeluaran pemerintah naik walaupun tidak secara signifikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa jumlah peningkatan IPM tidak cocok dengan jumlah dana yang dialokasikan pada sektor pendidikan dan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang rata-rata dikeluarkan dengan jumlah yang besar, walaupun IPM Sumbar rata-rata sudah meningkat, tapi tetap ada Kota/kabupaten yang mempunyai indeks pembangunan manusia yang rendah yang menandai bahwa akses pendidikan dan kesehatan belum terlalu memadai. Oleh karena itu penulis berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah**

Dalam Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Dalam Perspektif Islam”.

KAJIAN PUSTAKA

A. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Menurut pengertian dari UNDP, sebuah metode yang dipergunakan, agar bisa menelaah peningkatan pengembangan masyarakat yaitu IPM (indeks pembangunan manusia) atau HDI (human development index) Sejak tahun 1990, UNDP sudah menggunakan IPM untuk menghitung upaya pembangunan manusia di berbagai wilayah. Walaupun terbatas untuk menghitung seluruh aspek pengembangan, IPM bisa mengevaluasi ranah utama pembangunan manusia yang menggambarkan kompetensi dasar penduduk.⁴

Teori Human Capital mengatakan bahwa manusia yang memiliki kualitas tinggi merupakan aset penting bagi kemajuan suatu negara. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai investasi pada "kapital manusia". Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan individu, negara dapat menggapai ekonomi yang terus berkelanjutan dan selau tumbuh dan kualitas hidup masyarakatnya akan terus mengalami peningkatan. Dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI), teori human capital menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan serta kesehatan manusia memiliki dampak pada kenaikan perkembangan manusia dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika kualitas pendidikan dan kesehatan terus meningkat, didukung oleh alokasi anggaran pemerintah, hal itu akan secara tidak langsung memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Individu-individu kompeten dapat menjadi modal utama dalam proses pembangunan. Dengan manusia yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan produksi.⁵

Indikator IPM yaitu Kesehatan adalah faktor krusial yang memungkinkan penduduk suatu negara berpartisipasi dalam upaya pembangunan dan mencapai kesuksesan, kesehatan dan pendapatan perkapita.⁶

Pada Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT menyatakan kalau pembangunan manusia dalam Islam juga mengedepankan keselamatan dalam kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, usaha untuk mencapai tujuan syariah akan membawa kebaikan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan ini tidak mengenyampingkan kebutuhan primer dan keinginan diri sendiri maupun berkelompok.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S An-Anbiyah[21]:107).

Dari ayat tersebut, dijelaskan kalau manusia memiliki peran sebagai sumber kebaikan, yang bertujuan untuk menyebarkan kebaikan di dunia. Dalam Islam, pembangunan dianggap sebagai sasaran pertama yang diarahkan ke kesejahteraan umat. Islam dianggap sebagai anugrah bagi semua makhluk dengan tujuan agar kehidupan menjadi lebih sejahtera dan bermanfaat, tanpa kekurangan atau penderitaan. Kebaikan untuk manusia dan kebaikan untuk alam semesta menjadi pijakan dari proses pembangunan, yang harus bersifat konsisten untuk memastikan bahwa manusia ditempatkan dalam perjalanan pembangunan yang berfokus pada pencapaian tujuan syariah.⁷

⁴ Mongan, Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 2019 163-176.

⁵ E, Susanti & Hidayat N, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan seta Infrastruktur Terhadap IPM Di Kalimantan Timur, *Eco-Build Journal* Vol 4 No 2

⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008

⁷ Khairina Tambunan, dkk, *Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Al-quran Perspektif Quraish Shihab*. Human Falah, Vol 9, N0 2, (2022).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan

Dana yang disalurkan ke bidang pembangunan bisa dimanfaatkan untuk menyediakan prasarana pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan secara merata kepada seluruh penduduk Indonesia. Mengalokasikan 20% APBN pada anggaran pendidikan ialah komponen dari inisiatif pemerintah untuk menaikkan mutu sistem pendidikan nasional. Pemerintah memandang pendidikan merupakan salah satu elemen krusial untuk mendukung pembangunan negara. Kenyataan ini tercermin dari signifikansinya anggaran pemerintah yang dimanfaatkan untuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan pendidikan yang didukung oleh anggaran yang memadai menunjukkan bahwa pemerintah memandang sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam mendorong kemajuan dan pembangunan Indonesia.⁸

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai penanaman modal, meliputi juga alokasi dana untuk bidang pendidikan serta layanan kesehatan. Dengan demikian, anggaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk berbagai bidang, termasuk untuk mendanai investasi di sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional.⁹

Dana yang dialokasikan ke sektor kesehatan ialah upaya dalam mencukupi kebutuhan mendasar masyarakat, yakni hak memperoleh layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 dan Undang-Undang kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Oleh karena itu, menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama harus di anggap sebagai investasi guna meningkatkan mutu sumber daya manusia. Menyalurkan dana yang cukup pada sektor kesehatan merupakan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan hak dasar warga negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Dana yang dialokasikan ke sektor kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan mengalokasikan dana yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap perawatan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta mempromosikan kesetaraan dalam aspek kesehatan. Dengan kata lain, Dana yang dialokasikan di sektor kesehatan merupakan investasi penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan kesehatan seluruh warga negara dan mendukung perbaikan potensi individu. Melalui pengalokasi dana yang efektif, pemerintah dapat memperluas cakupan layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan.¹¹

METODE PENELITIAN

Pada kajian ini, penulis menerapkan metode kuantitatif. Metode yang dipilih ialah metode kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data dari beragam referensi seperti buku dan artikel, baik yang berasal dari sumber-sumber perpustakaan dan materi online. Tujuan dari metode kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan berbagai teori yang nantinya bisa memberikan jawaban-jawaban pada pertanyaan pada penelitian ini. Dalam menganalisa data, penulis menerapkan sejumlah teknik, yaitu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari pengujian normalitas, pengujian heteroskedastisitas, pengujian autokorelasi, dan pengujian multikolinearitas. Selanjutnya pengujian regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Melalui teknik-teknik analisis data tersebut, penulis berusaha untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti secara komprehensif.

⁸ Irfan Syaqui Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Rajawali Pers, 2016)

⁹ Bila Wahid, *Pengaruh pengeluaran pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan ekonomi*, (2012)

¹⁰ Nanda, Rahmi dan Afdhal Putera, *Kesejahteraan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan harapan hidup di Provinsi Aceh: Sebuah pendekatan data panel*, Jurnal Ekonomi Pembangunan

¹¹ Tjiptoherijanto, Priyono, *Untaian Pembangunan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: FEUI, 1998)

HASIL**A. Pengujian asumsi klasik****1. Uji normalitas**

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,16739277
Most Extreme Differences	Absolute	,125
	Positive	,084
	Negative	-,125
Kolmogorov-Smirnov Z		,684
Asymp. Sig. (2-tailed)		,737
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sesuai dengan tabel di atas, diperoleh informasi jika tingkat signifikansi Asymp.sig (2- tailed) sejumlah $0,737 > 0,05$. Oleh karena itu cocok sama kriteria pengambilan keputusan pada pengujian normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat ditarik kesimpulan jika data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	Pengeluaran Pendidikan	,621	1,611
2	Pengeluaran Kesehatan	,621	1,611
a. Dependent Variabel: Indeks Pembangunan Manusia			

Menurut tabel pengujian multikolinearitas di atas diperoleh nilai tolerance untuk variabel Pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan sebesar $0,621 > 0,10$ dengan nilai VIF $1,611 < 10,0$. Jadi dapat disimpulkan jika tidak terindikasi gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	67,382	,763		88,300	,000
1	Pengeluaran Pendidikan	,001	,001	,337	1,678	,105

2	Pengeluaran Kesehatan	,002	,002	,295	1,465	,154
---	-----------------------	------	------	------	-------	------

Berdasarkan tabel di atas bisa kita lihat nilai signifikansi dari uji heterokedastisitas dengan metode uji glejser untuk variabel pengeluaran pendidikan 0,105 dan variabel pengeluaran kesehatan sebesar 0,154. Pada pengujian glejser ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terindikasi terjadinya heteroskedastisitas. Fakta ini dibuktikan dengan nilai signifikansi kedua variabel tersebut melebihi dari 0,05 yang berpedoman pada dasar pengambilan ketetapan.

4. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,568 ^a	,323	,273	3,28353	1,952
a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Kesehatan, Pengeluaran Pendidikan					
b. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia					

Menurut pengujian autokorelasi di atas, didapatkan nilai Durbin-Watson sejumlah 1,952, Hasil ini mengindikasikan jika data tidak terjadi gejala autokorelasi. Disebabkan nilai Durbin-Watson 1,952 terletak antara nilai 2-du (1,567) & 4-du (2,433) yang artinya tidak terindikasi autokorelasi.

B. Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	67,384	,313		215,441	,000
1	Pengeluaran Pendidikan	,001	,000	,510	4,093	,000
2	Pengeluaran Kesehatan	,002	,001	,446	3,573	,001
a. Dependent Variable: Y1						

Sesuai dengan output SPSS, jadi bentuk model regresi linier bergandanya adalah seperti berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 67,384 + 0,001X_1 + 0,002X_2 + e$$

Sesuai dengan model regresi yang didapatkan, dapat diinterpretasikan nilai konstanta memiliki nilai sebesar 67,384. Interpretasi dari nilai konstanta 67,384 adalah: jika variabel x_1 dan x_2 diasumsikan stabil atau mempunyai nilai 0, dengan begitu rata-rata IPM adalah sebesar 67,384.

Variabel Indeks pembangunan manusia dipengaruhi secara positif oleh variabel belanja oleh pemerintah. Fakta ini diindikasikan oleh tingkat koefisien sejumlah 0,001. Interpretasinya adalah: kalau terdapat peningkatan sejumlah 1% pada variabel belanja pemerintah untuk pendidikan, sehingga hal itu bisa menaikkan persentase IPM sejumlah 0,01%.

Variabel belanja pemerintah di sektor pendidikan mempunyai hubungan positif pada variabel indeks pembangunan manusia. Fakta ini diindikasikan oleh nilai koefisien sejumlah 0,002. Interpretasi dari nilai koefisien 0,002 adalah: kalau terdapat peningkatan sejumlah 1%

pada variabel belanja pemerintah untuk pendidikan, sehingga hal itu bisa menaikkan persentase IPM sejumlah 0,02%.

C. Uji Hopitesis

1. Uji T

Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	67,384	,313		215,441	,000
1	Pengeluaran Pendidikan	,001	,000	,510	4,093	,000
2	Pengeluaran Kesehatan	,002	,001	,446	3,573	,001

a. Dependent Variable: Y1

a. Pengaruh Pengeluaran Pendidikan Terhadap IPM

Menurut tabel t di atas nilai signifikansi variabel pengeluaran pendidikan ialah sejumlah 0,000. Yang mana $0,000 < 0,05$ sehingga bisa kita simpulkan kalau H_0 diterima, maksudnya yaitu pengeluaran pendidikan berpengaruh pada Indeks pembangunan manusia. Menurut output diatas diketahui nilai t hitung variabel pengeluaran pendidikan sejumlah $4,093 > t$ tabel (2,051), sehingga kita bisa menyimpulkan jika H_1 diterima. Yang artinya pengeluaran pendidikan berpengaruh pada terhadap IPM.

b. Pengaruh Pengeluaran Kesehatan Terhadap IPM

menurut tabel di atas nilai substansial variabel pengeluaran kesehatan ialah sejumlah $0,001 < 0,05$ serta nilai t hitung $3,573 > t$ tabel (2,051) Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan jika H_1 diterima.

2. Uji F

Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	138,834	2	69,417	6,438	,005 ^b
Residual	291,103	27	10,782		
Total	429,938	29			

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Kesehatan, Pengeluaran Pendidikan

Menurut tabel output SPSS tingkat signifikansi ialah sejumlah 0,005. mengingat nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ sehingga kita bisa menyimpulkan kalau H_1 diterima, dimana variabel X mempengaruhi Y

Menurut data yang ditamikan output SPSS di atas, Diindikasikan nilai F hitung $6,439 > F$ tabel 3,34 oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan jika H_1 diterima yaitu variabel X secara simultan berdampak pada variabel Y.

3. Uji Determinasi

Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,568 ^a	,323	,273	3,284
a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Kesehatan, Pengeluaran Pendidikan				
b. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia				

Menurut informasi yang tersaji dalam tabel, diketahui jika tingkat koefisien determinasi atau R-Square tercatat sejumlah 0,568. Dengan kata lain, koefisien determinasi tersebut bernilai 56,8%. Angka ini mengindikasikan bahwa variabel X_{1,2} dengan cara sama-sama memberikan dampak sebesar 56,8% pada variabel Y. Dengan demikian 56,8% variasi yang terjadi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel X₁ dan X₂ secara simultan. Sementara itu sisanya yaitu 43,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut hasil pengujian t bisa diindikasikan nilai signifikansi komponen pengeluaran pendidikan dengan jumlah $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} variabel pengeluaran pendidikan sejumlah $4,093 > t_{tabel}$ (2,051). Hasil ini dikatakan berpengaruh karena sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan. Berdasarkan hasil uji t yang sudah dilaksanakan, bisa dilihat kalau belanja pemerintah untuk pendidikan berdampak baik dan substansial pada Indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti hipotesis alternatif (H₁) diterima.

Hasil uji ini menegaskan pentingnya menjadikan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan sebagai prioritas. Pemerintah perlu terus meningkatkan anggaran pendidikan, baik untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualifikasi guru, maupun program-program yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Diluar itu, pemerintah harus memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran pendidikan. Evaluasi dan perbaikan program-program pendidikan secara berkala juga perlu dilakukan, agar pendidikan dapat benar-benar berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan kata lain, prioritas dan peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, serta evaluasi dan perbaikan program-program pendidikan yang merupakan hal-hal penting yang harus dilaksanakan agar sektor pendidikan bisa berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan IPM.¹²

Berdasarkan penelitian Siti Amrina Hasibuan dengan Muhammad Syahbudi, belanja pemerintah untuk pendidikan mempunyai pengaruh baik dan substansial pada IPM di Kota Medan. Dengan demikian, hipotesis nol (H₀) tidak diterima, yang berarti terdapat dampak substansial diantara belanja pemerintah untuk pendidikan (X) dengan Indeks pengembangan manusia (Y) di Kota Medan.¹³

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Angga Setiawan dan Fikriah, diketahui bahwa investasi pemerintah untuk pendidikan berdampak baik dan substansial pada Indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. Fakta ini menunjukkan jika pengaruh pengeluaran belanja pemerintah di sektor pendidikan terhadap Indeks pembangunan manusia adalah signifikan.¹⁴

Berdasarkan tabel hasil uji-t, didapatkan sejumlah -4,462, sedangkan tingkat t tabel pada derajat kebebasan $\alpha = 5\%$ (0,05) ialah sejumlah -3,182. Karena nilai t hitung (-4,462) > dari nilai t tabel (-3,182) secara absolut, oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan jika belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh secara individu. Selanjutnya, nilai signifikan yang dihasilkan adalah 0,021, yang lebih rendah dari 0,05. Ini berarti jika pemerintah belanja di ranah

¹² Andri Irawan dan Ali Akbar, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020," *KLASSEN*, 1.2 (2021), 124–34.

¹³ Siti Amrina Hasibuan et al., "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7.30 (2022), 1158–66.

¹⁴ Fikrah, Angga setiawan, "Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 21.03 (2021), 103–14.

pendidikan akan berdampak substansial pada indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian, dapat disimpulkan kalau alokasi dana oleh pemerintah dibidang pendidikan dari sisi individu memiliki pengaruh substansial pada IPM di Kabupaten Sumbawa.¹⁵

Penelitian yang pernah dilaksanakan oleh Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba dan Pawan Darasa Panjaitan juga menunjukkan hasil yang serupa. Hasil uji-t mengindikasikan jika belanja pemerintah di bidang pendidikan mempunyai tingkat signifikansi sejumlah 0,000 (lebih kecil dari 5%). Penghitungan dari pengujian t adalah sejumlah 4,332, sedangkan nilai t tabel adalah 2,262. Karena hasil pengujian t hitung melebihi daripada nilai t tabel, maka bisa ditarik kesimpulan semakin besar belanja pemerintah di sektor pendidikan, sehingga nantinya IPM akan meningkat secara signifikan.¹⁶

B. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Setelah dilakukan pengujian t, bisa diindikasikan jika Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami kenaikan ketika pemerintah melakukan alokasi dana untuk kesehatan. Faktanya ini dibuktikan dengan simpulan jika variabel pengeluaran di sektor kesehatan menunjukkan tingkat signifikansi sejumlah 0,000 (kurang dari 0,05) dan nilai t hitung sejumlah 3,573 (melebihi t tabel 2,051). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) bisa dipertahankan, berarti komponen pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berdampak baik & substansial pada IPM. Atau dapat diartikan bahwa, apabila pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan, sehingga Indeks pembangunan manusia juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan temuan memperlihatkan jikalau investasi pemerintah untuk kesehatan mempunyai peran yang krusial untuk menaikkan kompetensi manusia, yang tergambar dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian, pemerintah harus mempertahankan dan bahkan memperbesar alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Hal ini dapat dilakukan lewat pengadaan layanan kesehatan yang mumpuni, dan pengembangan kebijakan-kebijakan yang memiliki tujuan untuk memperluas jangkauan dan mutu layanan kesehatan untuk rakyat. Tidak hanya itu, pemerintah harus memastikan bahwa penyebaran dan distribusi anggaran kesehatan dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan di seluruh wilayah, sehingga dampak positifnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia dapat dirasakan secara menyeluruh.

Berdasarkan teori ekonomi kesehatan, investasi pemerintah di bidang kesehatan akan menaikkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat selanjutnya akan berdampak positif pada produktivitas dan partisipasi ekonomi, serta indikator-indikator kesejahteraan lainnya yang tercakup dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Teori manusia sebagai modal (human capital) juga menekankan pentingnya pembiayaan untuk kesehatan dan pendidikan guna menaikkan kompetensi manusia. Peningkatan kemampuan tenaga kerja akan memacu kemajuan ekonomi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan kata lain, investasi pemerintah yang difokuskan pada perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan, serta investasi di bidang pendidikan, terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, yang tercermin dalam peningkatan indeks kualitas hidup.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan temuan yang diperoleh dalam studi yang dilakukan oleh Dita Ayu dan Hadi Sasana dengan topik yang serupa. Dalam penelitian mereka, diperoleh hasil sebagai berikut yaitu koefisien regresi untuk variabel belanja pemerintah di bidang kesehatan adalah sejumlah 0.310, nilai yang mencapai 0.0310 lebih sedikit dari 0.05. Fakta ini menunjukkan jikalau komponen belanja pemerintah untuk kesehatan berdampak baik dan substansial pada Indeks pembangunan manusia secara (individual).¹⁷

¹⁵ Rahim Abdul, Marisa Sutant dan Putri Anggita, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Ipm Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2020", *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9.3, (2021)

¹⁶ Sidabutar Sanniana, Elidawaty Purba dan Pawan Darasa Panjaitan, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Ipm Kabupaten Simalungun, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2.2, (2020)

¹⁷ Dita Ayu Anantika dan Hadi Sasana, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara Apec," *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 9 (2020), 167-78.

Temuan kajian ini juga seiring dengan studi yang dilaksanakan oleh Muhammad Ade Fajar & Lili Indrawati sebelumnya. Pada penelitian tersebut, ditemukan hasil uji uji individu menunjukkan jika komponen belanja pemerintah di sektor pendidikan berdampak secara individual pada Indeks pembangunan manusia. Fakta ini dibuktikan dengan tingkat signifikansinya 0,022, yang lebih rendah daripada 0,05. Maksud lainnya yaitu, dana yang dibelanjakan pemerintah untuk pendidikan telah terbukti berdampak positif serta substansial pada peningkatan Indeks pembangunan manusia.¹⁸

Studi ini juga pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Enika Tje Yustin Dima dan Beatrix Seran. Dalam hasil pengujian statistik individual bagian pembiayaan pemerintah untuk kesehatan, diperoleh angka signifikansi 0,003 yang rendah dari 0,05. Temuan ini selaras dengan temuan studi ini, yang juga menunjukkan bahwa investasi pemerintah di bidang kesehatan mempunyai peran krusial untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di suatu wilayah.¹⁹

Hasil studi Irman F. Ismail, Een N Walewangko, dan Javline I Sumual. Dalam penelitian tersebut, mengindikasikan jika untuk variabel kesehatan nilai t-hitungnya melebihi dari nilai t-tabel dan nilai signifikansinya kurang dari taraf signifikansi yang digunakan. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) tidak bisa dipertahankan & hipotesis alternatif (H_a) terbukti benar. Hal ini mengindikasikan jika komponen kesehatan secara individual memberikan pengaruh yang substansial pada Indeks Pembangunan Manusia.²⁰

C. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Secara Simultan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat dalam Perspektif Islam

Dari analisis pengujian F yang sudah dilakukan sebelum ini, dinyatakan jika variabel belanja pemerintah untuk pendidikan & kesehatan dengan cara sama-sama berdampak baik serta substansial pada Indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatra Barat. Pernyataan ini diverifikasi dengan nilai F yang didapatkan sejumlah 0,005 yang kurang daripada 0,05 sebagai nilai dasar dalam pengambilan ketetapan. Diluar itu, hasil perhitungan pengujian F memperlihatkan angka 6,439, dimana nilai ini melebihi nilai F tabel sebanyak 3,34.

Oleh sebab itu, bisa kita simpulkan kalau hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang artinya alokasi dana pemerintah untuk pendidikan & kesehatan berdampak baik serta substansial pada variabel Indeks pembangunan manusia di provinsi sumatera barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi biaya pemerintah yang mencukupi untuk sektor pendidikan serta kesehatan berperan sangat vital dalam menaikkan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Temuan ini selaras dengan teori ekonomi pembangunan yang menyatakan perlunya alokasi dana di bidang pendidikan serta kesehatan untuk mengembangkan kualitas SDM. Dengan demikian akan memacu peningkatan ekonomi serta pengembangan manusia yang berkelanjutan. Dana yang dikeluarkan pemerintah di kedua sektor tersebut dapat memperluas jangkauan dan memperbaiki mutu layanan pendidikan serta kesehatan untuk rakyat. Selanjutnya, hal ini akan memberikan pengaruh baik terhadap bagian-bagian pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti angka harapan hidup, kemampuan baca tulis, serta standar kehidupan yang layak.

Berdasarkan hasil uji (R^2), bisa diketahui kalau tingkat koefisien determinasi atau R^2 ialah sejumlah 0,568 atau setara dengan 56,8%. Persentase ini menunjukkan jika variabel belanja pemerintah di ranah pendidikan serta kesehatan secara bersamaan berdampak pada IPM sebesar 56,8%. Dengan kata lain, 56,8% variasi dalam Indeks Pembangunan Manusia bisa diinterpretasikan oleh variabel belanja pemerintah di bidang pendidikan & kesehatan. Sementara itu sebagian lainnya sebesar 43,2 persen, dikendalikan oleh variabel lainnya selain yang tercakup dalam model regresi yang tidak dianalisis pada studi ini.

Temuan dari studi ini cocok dengan hasil studi yang sebelumnya dilakukan oleh Ilhelmus Mahuze, Vecky A J masinambow, dan Agnes L. Ch. P. Lapijan. Penelitian mereka

¹⁸ Muhammad Ade Fajar Dan dan Lili Indrawati, "Pengaruh Belanja Pendidikan , Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur)", Indonesian Accounting Research Journal, 1.1 (2020), 108–18.

¹⁹ Enika Tje Yustin Dima dan Beatrix Seran, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang" Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5.2 (2020), 7–17.

²⁰ Irman F. Ismail, Een N Walewangko, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21.03, (2021) .

menunjukkan kalau alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan & kesehatan secara simultan memberikan dampak baik & substansial pada Indeks pembangunan manusia di kabupaten Boven Digoel. Sektor kesehatan berperan sebagai fondasi bagi sektor pendidikan, yang memungkinkan keduanya untuk memberikan dampak baik & substansial pada Indeks pembangunan manusia di kabupaten Boven digoel.

Dengan kata lain, investasi pemerintah yang berimbang dan terintegrasi pada bidang-bidang pendidikan & kesehatan terbukti efektif meningkatkan indeks pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Hasil studi yang dijalankan Enika Tje Yustin Dima dan Beatrix Seran menunjukkan jika dari pengujian signifikansi simultan memperoleh angka signifikansi sejumlah 0,004 yang belum melebihi 0,05. Analisis data memperlihatkan jika H_0 tidak diterima dan H_1 diterima, Oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan jika sekitar 95 persen dari alokasi belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan & ekonomi berpengaruh terhadap indeks perkembangan individu.²¹

Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai pemeran utama yang memainkan peran vital dalam upaya pembangunan. individu yang berkualitas dianggap sangat krusial, karena pada Islam manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia, dilengkapi dengan akal budi yang memungkinkan mereka menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan. Sebagai wakil Allah, manusia mengemban kewajiban dan amanah untuk berusaha dan mengatur keselamatan bumi, agar semua makhluk hidup bisa hidup dengan layak. Dengan kata lain, dalam perspektif Islam, manusia memiliki peran sentral serta peran penting dalam usaha pengembangan dan kemakmuran masyarakat. Jadi, Islam memandang manusia sebagai aktor utama dan pemimpin yang bertanggung jawab atas pembangunan dan kesejahteraan, karena manusia dibekali dengan akal dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan tugas tersebut.

Untuk menghasilkan manusia-manusia yang memiliki kompetensi diri yang tinggi, maka diperlukannya akses ke pendidikan bermutu dan kondisi kesehatan yang optimal. Untuk itu nantinya bisa tercipta manusia-manusia yang memiliki kompetensi yang diharapkan. Sehingga dengan adanya manusia yang berkualitas, secara tidak langsung juga akan berdampak pada kualitas hidup dan pendapatan perkapita pada masing-masing individu maupun berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Oleh sebab itu, diharapkan kepada pemerintah setempat untuk dapat memaksimalkan penggunaan dana yang telah dianggarkan. Sehingga nanti kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi lebih baik dan bisa menunjang kualitas manusia di daerah tersebut.

SIMPULAN

Anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pendidikan di provinsi Sumatera Barat menunjukkan korelasi positif dan dampak yang substansial pada Indeks pembangunan manusia. Artinya, kenaikan penyebaran anggaran pemerintah untuk pendidikan akan meningkatkan IPM di Sumatera Barat. Alokasi anggaran pemerintah di bidang kesehatan juga memiliki hubungan baik serta dampak yang substansial pada IPM di provinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain, meningkatkan alokasi dana di bidang kesehatan bisa berdampak pada peningkatan kualitas manusia di Sumatera Barat.

Secara simultan, dana yang dikeluarkan pemerintah pada sektor pendidikan serta kesehatan memiliki pengaruh positif dan substansial pada peningkatan indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat. Hasil analisis statistik memvalidasi temuan ini, dengan nilai signifikansi dan nilai F yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Dalam perspektif Islami, peran pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan sangat perlu untuk mewujudkan manusia terdidik dan sehat, sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Sebagai salah satu langkah pemerintah ialah mengalokasikan dana bagi sektor kesehatan dan pendidikan.

²¹ Enika Tje Yustin Dima dan Beatrix Seran, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5.2 (2020), 7–17.

SARAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan & kesehatan secara proporsional dan berkelanjutan, sejalan dengan ajaran Islam. Pemerintah harus memastikan penggunaan dana pendidikan dan kesehatan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan berbagai program pendidikan dan kesehatan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk masyarakat, disarankan agar memanfaatkan program-program pendidikan dan kesehatan yang disediakan pemerintah secara optimal, dan memasukkan nilai-nilai Islam saat menjalani hidup seperti menjaga kesehatan dan mendorong anak-anak untuk belajar. Untuk riset yang mendatang, dianjurkan untuk menyertakan beberapa variabel lain sehingga dapat meningkatkan mutu hasil penelitian.

REFERENSI

- Anantika, Dita Ayu dan Hadi Sasana. 2020. *“analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di negara apec,”* Diponegoro Journal Of Economics. 9. 167–78.
- Aziz, Abdul. 2008. *ekonomi Islam analisis mikro dan makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Beyk, Ifan Sauqi. 2016. *ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Pers
- Dima, Enika Tje Yustin dan Betrix Seran. 2020. *“pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) kota Kupang”* .Jurnal Ekonomi Pembangunan. 5.2. 7–17.
- Fajar, Muhammad Ade dan Lili Indrawati. 2020. *“pengaruh belanja pendidikan , belanja kesehatan dan belanja perumahan dan fasilitas umum terhadap indeks pembangunan manusia (studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur)*. Indonesian Accounting Research Journal. 1.1. 108–18.
- Hasibuan, Siti Amrina et al. 2022. *“pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia”* jurnal masharif al-syariah: jurnal ekonomi dan perbankan syariah. 7.30. 1158–66.
- Irawan, Andri dan Ali Akbar. 2021. *“pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pembangunan manusia di provinsi sumatera selatan tahun 2017-2020”*. Klassen. Vol. 1. no. 2, 124–34.
- Ismail, Irman F , Een N Walewangko. 2021. *analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Manado*. jurnal berkala ilmiah efisiensi. 21.03 .
- Jigan, M L. 2014. *ekonomi pembangunan dan perencanaan*. jakarta: PT RajaWali Pers Persada
- Mahuz, Ilhelmus dan Vecki A. J. Masinambow. Agnes L. Ch. P. Lopian. 2022. *“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan manusia di kabupaten boven digoei”*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 22.3. 1–12.
- Menalui Pertumbuhan ekonomi.*
- Mogan. 2019. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Indonesian Treasury Review. Vol 4. no.2 163-176.
- Prijono, Tjiptoherijanto. 1998. *untaian pembangunan sumber daya manusia*. jakarta: FEUI.
- Rahim, Abdul, Marisa Sutant dan Putri Anggita. 2021. *“pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap ipm kabupaten sumbawa tahun 2015-2020”*. jurnal ekonomi & bisnis. Vol. 9. no. 3.
- Rahmi, Nanda dan Afdhal Putera. 2019. *kesejahteraan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan harapan hidup di Provinsi Aceh: Sebuah pendekatan data panel*, junal ekonomi pembangunan. Vol 17. no 1
- Setiawan, Fikrah, Angga. 2021. *“pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di indonesia,”* jurnal ilmiah mahasiswa (JIM), 21.03, 103–14.
- Sidabutar, Sanniana, Elidawaty Purba dan Pawan Darasa Panjaitan. 2020 *“pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kemiskinan terhadap Indeks pembangunan manusia Kabupaten Simalungun*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 2. no. 2

- Susanti, E & Hidayat. 2012. *analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan melalui pertumbuhan ekonomi.*
- Syafira. 2019. “*pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di kota langsa,*” penelitian ekonomi dan akuntansi (JENSI), 3, 126–38.
- Sofya, Heppi, *pengaruh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonmi terhadap indeks pembangunan infrastruktur terhadap Indeks pembangunan manusia di Kalimantan Timur,* eco-build journal Vol 4 No 2
- Tambunan, Khairina, dkk. 2022. *Konsep Indeks Pembentukan Manusia (IPM) Dalam Al-quran Perspektif Quraish Shihab.* Human Falah. Vol 9. N0 2.
- Wahid, Bila. 2012. *Pengaruh pengeluaran pemerintah Terhadap Indks Pembangunan Manusia*